

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan.

Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, karena desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus secara bebas rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, bab V Penyelenggara Pemerintah Desa Pasal 26 dikatakan bahwa “kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan”. Jelas dikatakan dalam hal ini bahwa kepala desa memiliki tugas dan kewajiban tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan tapi juga pembangunan.

Pengelolaan pembangunan infrastruktur desa sangat berarti karena dampak pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan masyarakat sangat bermanfaat untuk kelancaran kegiatan perekonomian maupun kehidupan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur di desa dapat dilakukan dengan adanya dukungan partisipasi masyarakat baik secara moril maupun materil sesuai kondisi fisik desa.

Pembangunan infrastruktur di desa pada hakikatnya adalah proses perbaikan yang terus menerus agar kemajuan desa lebih cepat sehingga cita-cita agar desa itu maju dan sejahtera dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sebagai penunjang percepatan kesejahteraan masyarakat di desa.

Pembangunan terhadap Infrastruktur desa terkadang terjadi masalah yang muncul dalam pelaksanaan proses pengelolaan pembangunan infrastruktur desa yaitu kondisi desa yang belum mampu melepaskan diri dari ketergantungan bantuan pemerintah pusat dan daerah. Perubahan kondisi fisik desa lambat dilakukan karena desa terletak agak jauh dari pertumbuhan kota, keterbatasan anggaran pemerintah desa untuk melakukan proses pembangunan fasilitas tertentu membuat desa tidak dapat berbuat banyak melakukan pembangunan infrastruktur desa karena jumlah anggaran dana desa yang paling menentukan pembangunan infrastruktur desa yang akan dibangun.

Permasalahan, kendala ataupun halangan dalam membangun infrastruktur desa kiranya menjadi pelajaran berharga untuk dievaluasi dengan dasar agar dapat dijadikan bahan koreksi pembangunan infrastruktur desa kedepan. Permasalahan, kendala ataupun halangan dalam membangun infrastruktur desa kiranya dapat dilakukan evaluasi serta memberikan solusi terhadap kendala-kendala tersebut,

oleh karena itu penulis mencoba penelitian di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Desa Bangunjiwo yang secara Administratif merupakan bagian dari Kabupaten Bantul diantara 75 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan salah satu dari 4 (empat) Desa di wilayah Kecamatan Kasihan.

Desa Bangunjiwo adalah merupakan gabungan dari 4 (empat) Kalurahan Lama yaitu :

- a. Kalurahan Sribitan
- b. Kalurahan Paitan
- c. Kalurahan Bangen
- d. Kalurahan Kasongan

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini merupakan penjabaran visi dan misi Desa Bangunjiwo dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul yang memuat Gambaran Umum Desa, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Desa serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Desa. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa, dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang nantinya diserahkan kepada Bupati Bantul.

Sasaran Pembangunan Desa Bangunjiwo dalam rencana pembangunan jangka menengah periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
  - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
  - c. Meningkatnya pendapatan asli desa
  - d. Sarana dan prasarana (infrastruktur) yang semakin baik
1. Jumlah sarana pendidikan dan tempat ibadah bertambah
  2. 60% Panjang jalan desa dalam kondisi baik
  3. 50% panjang saluran irigasi dalam kondisi baik
  4. 60% jumlah sarana olah raga dalam kondisi baik
  5. 80% jalan kampung dikeraskan
  6. Jumlah sarana pengelolaan sampah bertambah 50%

Dalam Peraturan Desa Bangunjiwo No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 banyak program pembangunan infrastruktur yang dilakukan diantaranya adalah:

- a. Rehab rumah tidak layak huni
- b. Lantainisasi rumah
- c. Pembangunan MCK/jambanis
- d. Pengaspalan jalan
- e. Pembangunan bengkel/talud jalan
- f. Pembangunan jembatan
- g. Pembangunan talud jembatan
- h. Pembangunan pengerasan/cor blok jalan

- i. Pembangunan gorong-gorong
- j. Rehab gorong-gorong
- k. Rehab selokan dan sumur resapan
- l. Pembangunan saluran air limbah rumah tangga
- m. Pembangunan IPAL KOMUNAL
- n. Pembangunan penyempurnaan fasilitas tempat ibadah
- o. Pembangunan gedung serbaguna/pertemuan
- p. Pembangunan pondok pemuda
- q. Pembangunan gedung TPA
- r. Pembangunan pendopo desa wisata
- s. Pembangunan MCK umum
- t. Pembangunan udang perkakas

Kinerja Kepala Desa Bangunjiwo yaitu Bapak Parja,S.T., M.Si selama ini selalu menampung aspirasi masyarakat khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat,hal ini bisa di lihat dari sasaran pembangunan Desa bangunjiwo dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019 karena yang perlu disoroti adalah bagaimana kinerja dari Kepala Desa selaku pemimpin desa yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengelola desa sesuai dengan aturan-aturan yang ada agar tujuan yang diharapkan pemerintah desa dapat tercapai.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bantul tahun 2018, Desa Bangunjiwo menempati rangking ke 4 Kinerja Pemerintah Desadari 75 Desa se Kabupaten Bantul dengan predikat

Baik. Namun kesuksesan pembangunan infrastruktur desa bangunjiwo perlu juga dilihat dari persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur tersebut, guna mendapatkan penilaian dari masyarakat desa bangunjiwo sehingga mendapatkan data yang lebih berimbang tidak hanya dari perspektif desa bangunjiwo.

Persepsi masyarakat sangatlah penting dalam menyajikan keberimbangan data yang disajikan, mengingat persepsi yang diberikan masing - masing individu atau setiap orang tidak selalu sama, walaupun dilakukan pada waktu dan tempat yang sama. Individu atau setiap orang akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat dan dialaminya.

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Bangunjiwo terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan Infrastruktur di desa Bangunjiwo karena salah satu kunci keberhasilan organisasi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa adalah terletak pada kemampuan manajemen aparat pemerintah desa khususnya Kepala Desa. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang persepsi masyarakat tentang kinerja Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Persepsi masyarakat tentang kinerja Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2015-2018".

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana persepsi masyarakat tentang kinerja Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur desa di Desa Bangunjiwo Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2015-2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja kepala desa Desa dalam pembangunan insfrastruktur desa di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis : Melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara komperhensif terhadap dunia pengetahuan khususnya para insan akademik maupun masyarakat pada umumnya.
2. Manfaat Praktis : Lebih praktisnya penelitian ini diharapkan secara langsung dapat menyentuh pemerintah khususnya di desa yang berhubungan dengan pentingnya kemampuan manajerial Kepala Desa dalam pembangunan desa.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Hendra Sumigar (2010), dengan judul Kemampuan Manajerial Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Atep Kecamatan Langowan Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan manajerial aparat pemerintah desa dalam pembangunan yang ada di Desa Atep Kecamatan Langowan Selatan, hal ini didasari dari pengamatan penulis yang notabene bertempat tinggal di desa tersebut sehingga bisa mengamati langsung pembangunan yang ada di desa. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan manajerial aparat pemerintah desa yang ada di desa Atep ternyata cukup baik namun perlu ada tambahan pelatihan mengenai perkembangan teknologi yang berkembang.

Mohamad Husni (2017) Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Di Desa Pa' Payak Kecamatan KrayanKa bupaten Nunukan, Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Penelitian ini membahas tentang peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik di desa, kemampuan kepala desa sebagai fasilitator, mediator dan motivator dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Pa'Payak berjalan baik, menyelenggarakan pemerintahan desa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta peningkatan pembangunan yang selalu berorientasi kepada kepentingan umum dan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat pembangunan desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pa'Payak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, data yang

dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menentukan informasi dilakukan dengan metode snowball sampling. Temuan dari penelitian ini bahwa Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan adalah Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator, Mediator dan sebagai Motivator dalam pembangunan fisik. Kepala Desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya hanya saja dalam melaksanakan perannya terdapat beberapa kendala sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya agar pembangunan yang adadi Desa Pa'Payak sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta peningkatan pembangunan yang selalu beorientasi kepada kepentingan umum.

Reigen Katihokang (2013) Pentingnya Kemampuan Manajerial Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat) Universitas Samratulangi Manado. Hasil penelitian ini bahwa Kemampuan manajerial aparat pemerintahan desa dalam penelitian ini dikaji melalui indikator kemampuan pengelolaan struktur organisasi, kemampuan memperoleh dukungan lingkungan, kemampuan pelaksanaan tugas (performance) dan kemampuan leadership secara umum disimpulkan cukup baik. Tingkat pembangunan desa dalam penelitian ini dikaji melalui adanya partisipasi masyarakat, adanya pertimbangan peran pemerintahan dan masyarakat dalam pembangunan, adanya kemandirian masyarakat serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan disimpulkan cukup baik.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Persepsi**

Menurut Gibson (1996) dalam bukunya yang berjudul Organisasi, Perilaku, Struktur, bahwa persepsi merupakan proses kognitif yang mana digunakan oleh seseorang untuk dapat menafsirkan serta memahami dunia yang ada di sekitarnya terhadap sebuah objek. Gibson juga menjelaskan jika proses pemberian makna terhadap lingkungan yang dilakukan oleh individu. Oleh sebab itu, setiap orang akan memberikan definisi yang berbeda satu sama lainnya meskipun objek nya adalah sama. Cara individu dalam melihat sebuah situasi akan lebih penting dibandingkan dengan situasi yang ada sendiri.

Menurut Asrori (2009:214) pengertian persepsi adalah “proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.” Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yakni interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna.

Walgito (dalam Kusnandi: 2007) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek utama dari persepsi, yaitu :

- a. Aspek Kognitif menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, masa lalu serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi.

- b. Aspek Afeksi menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan factor emosional seseorang.
- c. Aspek Konatif/Psikomotor menyangkut motivasi, perilaku atau aktivitas individu sesuai dengan persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu.

Pengaruh persepsi seperti yang telah dikemukakan, persepsi dipengaruhi oleh factor psikologis, termasuk asumsi-asumsi yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman masa lalu atau dapat dikatakan pengalaman yang sering terjadi pada tingkat bawah sadar, harapan-harapan budaya, motivasi (kebutuhan), dan suasana hati (mood). Sejumlah percobaan telah menunjukkan pengaruh factor-faktor tersebut pada persepsi.

## **2. Masyarakat**

Manusia adalah makhluk social (*homo socius*) yang selalu berhubungan satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian masyarakat yang diungkapkan oleh Abdul Syani (2007:30) yaitu kata masyarakat berasal dari *masyarak* (arab), yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya mendapatkan kesempatan menjadi masyarakat (Indonesia). Menurut Paul B. Horton (dalam Muin, 2013), pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam

kelompok itu.. Menurut Menurut Paul B. Horton (dalam Muin, 2013), pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dan adanya hubungan kontak sosial.

Pengertian masyarakat mewujudkan adanya syarat-syarat sehingga disebut dengan masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama dan adanya kerja sama diantara anggota kelompok memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan kelompoknya. Pengalaman hidup bersama ini menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku anggota. Menurut Soejono Soekanto (2009:22) masyarakat mempunyai ciri pokok yaitu :

- a. Manusia yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- c. Mereka merupakan suatu sistem yang hidup yang sama.

Menurut Abu Ahmadi dalam Abdul Syani (2007:32) menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu.

- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan yang sama.

### **3. Kinerja**

#### **a. Pengertian**

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006:67) kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Hersey Blanchard (1993) kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Demi penyelesaian tugas dan pekerjaan seseorang harus mempunyai derajat kesediaan dan kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidak cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa adanya pemahaman yang mendalam terkait apa yang akan dikerjakan serta bagaimana mengerjakannya.

Menurut Donelly, Gibson and Ivancevich (1987) kinerja mengarah pada tingkat keberhasilan melaksanakan tugas dan mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kinerja dinyatakan sukses apabila tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Schermerhorn, Hunt and Osborn (1991) kinerja sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan. Menurut Hasibuan, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan di atas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **b. Faktor yang mempengaruhi kinerja**

Menurut Griffin dalam Sule dan Saefullah (2005:235) kinerja terbagi ada tiga factor, yaitu :

##### 1) Kemampuan

Kemampuan merupakan kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaannya. Kemampuan SDM berkaitan dengan latar belakangnya seperti pendidikan seperti kemampuan soft skill lainnya.

##### 2) Motivasi

Motivasi merupakan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Dalam suatu organisasi atau instansi motivasi sangat dibutuhkan untuk mempengaruhi kinerja.

##### 3) Lingkungan pekerjaan

Lingkungan pekerjaan merupakan keadaannya dimana sumber daya atau situasi yang dilakukan untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut.

#### **c. Indikator kinerja**

Mc Donald dan Lawton dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsi (2005:174) mengemukakan indikator kinerja antara lain : *output oriented measures throughput, efficiency, effectiveness*. Selanjutnya indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan public.
- 2) *Effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.

Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septia Winarsi (2005:175) menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi, yang terdiri atas beberapa faktor berikut:

1. *Tangibles* atau ketampakan fisik, artinya ketetapan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh *providers*.
2. *Reliability* atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3. *Responsiveness* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong *customers* dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
4. *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada *customers*.
5. *Emphaty* adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh *providers* kepada *customer*.

Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) dalam bukunya yang berjudul Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik menjelaskan bagaimana cara untuk mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator mengacu pada prinsip-prinsip Good Governance secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

a. Produktivitas

Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktifitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktifitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan

ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

e. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang

tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dimensi pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006) meliputi lima dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Mengenai akuntabilitas, Dwiyanto (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders. Acuan pelayanan yang digunakan oleh organisasi publik juga dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik. Acuan pelayanan yang dianggap paling penting oleh suatu organisasi publik adalah dapat merefleksikan pola pelayanan yang dipergunakan yaitu pola pelayanan yang akuntabel yang mengacu pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa. Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian publik memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari berbagai macam indikator pengukuran kinerja yang diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja Kepala Desa Bangunjiwo dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo Kasihan Bantul.

#### **4. Kepala Desa**

##### **1. Pengertian Kepala Desa**

Menurut Widjaja (2008:27) Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada ditenga-tengah rakyat yang dipimpinnya.

##### **2. Tugas dan kewajiban Kepala Desa**

Menurut Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa hak dan kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berhak :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa

Dan Kepala Desa berkewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
7. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## **5. Pembangunan Infrastruktur**

### **a. Pengertian Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan lain-lain. Infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial ekonomi dilaksanakan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang

dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri (Kodatie,2005).

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015, Jenis Infrastruktur ekonomi dan sosial mencakup:

- 1) Infrastruktur transportasi
- 2) Infrastruktur jalan
- 3) Infrastruktur sumber daya air dan irigasi
- 4) Infrastruktur air minum
- 5) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat
- 6) Infrastruktur sistem pengelolaan limbah setempat
- 7) Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan
- 8) Infrastruktur telekomunikasi dan informatika
- 9) Infrastruktur ketenagalistrikan
- 10) Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan
- 11) Infrastruktur konservasi energi
- 12) Infrastruktur fasilitas perkotaan
- 13) Infrastruktur fasilitas pendidikan
- 14) Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian
- 15) Infrastruktur kawasan
- 16) Infrastruktur pariwisata
- 17) Infrastruktur kesehatan
- 18) Infrastruktur lembaga permasyarakatan, dan
- 19) Infrastruktur perumahan rakyat.

## **b. Sistem Infrastruktur**

Menurut Grigg & Fontane (2000), Sistem infrastruktur Sistem infrastruktur yaitu sebagai fasilitas- fasilitas atau strukturstruktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Disini, peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan 8 dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain.

## **c. Jenis-Jenis Infrastruktur**

Menurut Grigg, N. & Fontane, D. G. (2000), infrastruktur dibagi dalam 13 kategori sebagai berikut:

- a. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air (treatment plant),
- b. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang,
- c. Fasilitas pengelolaan limbah (padat),
- d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi,

- e. Fasilitas lintas air dan navigasi,
- f. Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya,
- g. Sistem transit publik,
- h. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi,
- i. Fasilitas gas alam,
- j. Gedung publik : sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll,
- k. Fasilitas perumahan publik,
- l. Taman kota: taman terbuka, plaza, dll, serta
- m. Fasilitas komunikasi.

Tiga belas jenis infrastruktur tersebut kemudian dikelompokkan dalam 7 kelompok besar sebagai berikut:

1. Transportasi (jalan, jalan raya, jembatan),
2. Pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan),
3. Komunikasi,
4. Keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai, saluran terbuka, pipa, dll),
5. Pengelolaan limbah (sistem pengelolaan limbah padat),
6. Bangunan, serta
7. Distribusi dan produksi energi.

#### **d. Indikator Pembangunan Infrastruktur**

Pengukuran efektivitas pembangunan tiap jenis infrastruktur mengadopsi dan memodifikasi pendekatan Gibson, Donely, dan Ivancevich (1996) yakni dengan pendekatan teori sistem. Berdasarkan pendekatan ini batasan kriteria efektif yakni:

1. Ketersediaan fisik (*availability*)
2. Kualitas fisik (*quality*)
3. Kesesuaian (*appropriateness*)
4. Pemanfaatan (*utility*) dan
5. Penyerapan tenaga kerja (*job creation*).

Selain itu, juga akan ditambahkan kontribusi Sektor Infrastruktur terhadap Perekonomian. Dasar pemikiran pemilihan variabel sebagai indikator terpenuhinya aspek efektivitas antara lain :

1. Ketersediaan fisik (*availability*) : bahwa dalam setiap aktivitas belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya akan menghasilkan output yang berupa barang secara fisik. Hal ini diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik;
2. Kualitas fisik (*quality*) : kualitas output yang dihasilkan. Bahwa aspek efektivitas akan lebih nyata apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas output yang baik dan optimal;
3. Kesesuaian (*appropriateness*) : kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilandasi dasar pemikiran

bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat;

4. Pemanfaatan (*utility*) : tingkat pemanfaatan atas output yang telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas output maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya;

5. Penyerapan tenaga kerja (*job creation*);

Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Desa Bangunjiwo.

#### **G. Definisi Konseptual**

Menurut Koentjoroningrat (1989), definisi Konseptual merupakan unsur pokok dari suatu penelitian dan jika masalah dan kerangka teorinya sudah jelas biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya merupakan definisi : secara singkat dari kelompok fakta atau gejala tersebut.

Definisi konseptual bisa juga merupakan suatu pengertian dari kelompok atau yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih segar untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian, atau pembatalan pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

Definisi konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang mengolah, memahami dan menafsirkan dengan menggunakan panca indranya mengenai suatu rangsangan (stimulus), pertanda atau segala sesuatu yang ada dalam lingkungan sekitarnya.
2. Kinerja Kepala Desa adalah kemampuan kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan padanya.
3. Pembangunan infrastruktur adalah usaha yang terencana dan dilakukan dengan membangun secara fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional Adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel penelitian (Singarimbun *et al.*, 1983).

### **a) Indikator Kinerja Kepala Desa**

- 1) Produktifitas. Diukur dengan indikator :
  - a. Perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) terkait kegiatan atau program yang dirasakan masyarakat
  - b. upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik.

- 2) Kualitas Layanan. Diukur dengan indikator:
    - a. Peningkatan kualitas pelayanan dalam kinerja pemerintahan
    - b. Adanya pengalaman dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan
  - 3) Responsivitas. Diukur dengan indikator:
    - a. Kemampuan dalam menanggapi kebutuhan keinginan serta kritik dari masyarakat
    - b. Kemampuan dalam Pemberian informasi dalam melayani masyarakat
  - 4) Aspek Responsibilitas. Diukur dengan indikator:
    - a. Kemampuan terkait dedikasi dan semangat kerja yang tinggi
    - b. Adanya program-program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi
  - 5) Aspek Akuntabilitas. Diukur dengan indikator:
    - a. Penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur
    - b. Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- b) Indikator Pembangunan Insfrastruktur**
- a. Ketersediaan fisik (*availability*). Diukur dengan indikator:
    - a. Adanya anggaran dalam APBDes untuk Pembangunan
    - b. Adanya output yang berupa barang secara fisik
  - b. Kualitas fisik (*quality*). Diukur dengan indikator:
    - a. Efektivitas Pengerjaan Pembangunan insfrastruktur
    - b. Kualitas pembangunan insfrastruktur yang baik

- c. Kesesuaian (*appropriateness*). Diukur dengan indikator:
  - a. Pembangunan infrastruktur Sesuai aspirasi masyarakat
  - b. Pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan
- d. Pemanfaatan (*utility*). Diukur dengan indikator:
  - a. Manfaat pembangunan infrastruktur dirasakan masyarakat
  - b. Pemanfaatan pembangunan infrastruktur secara efektif
- e. Penyerapan tenaga kerja (*job creation*). Diukur dengan indikator:
  - a. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik
  - b. Pembangunan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. menurut Sugiyono (2012), metode kuantitatif diartikan metode penelitian berdasar pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner, analisis data bersifat kuantitatif/statistik deskriptif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:13), penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai

variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Bangunjiwo yaitu pedukuhan II Ngentak, pedukuhan XI Sribitan, Pedukuhan XII Sribitan, Pedukuhan XV Kalipucang dan Pedukuhan XIX Sembungan. Alasan bahwa kelima Pedukuhan tersebut mewakili 19 Pedukuhan yang ada di Desa Bangunjiwo. Pemilihan 5 Pedukuhan tersebut karena mewakili sebaran wilayah penelitian yaitu sebelah Utara, Timur, wilayah Selatan, wilayah Barat dan wilayah Tengah.

## 3. Metode Pengambilan Sampel

### a. Populasi

Menurut Sugiyono (2011) Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini terdapat 7347 kepala keluarga yang tersebar di lima Pedukuhan di desa Bangunjiwo sebagai berikut:

**Tabel I.** Jumlah Kepala Keluarga di 5 Pedukuhan Penelitian

No	Pedukuhan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK
1	Ngentak	1156	1080	2236
2	Sribitan	674	675	1349
3	Bibis	580	527	1107
4	Kalipucang	702	654	1356
5	Sembungan	645	654	1299
	Jumlah	3757	3590	7347

Sumber: <http://bangunjiwo-bantul.desa.id/index.php/first>

## b. Sampel

Menurut Sugiyono (2011) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel diambil dengan pertimbangan bahwa populasi yang diambil terlalu besar dan tidak mungkin diambil secara keseluruhan mengingat keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Di samping itu sampel yang diambil dalam suatu penelitian agar menghasilkan data yang representatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan dan mengacu kepada beberapa ahli, seperti yang dikemukakan oleh Kasto yang menyadur pendapat teken dalam Singarimbun (1996), bahwa :

“Suatu metode pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat seperti: (1) dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti, (2) dapat menentukan presisi (*precision*) dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dan taksiran yang diperoleh, (3) sederhana, hingga mudah dilaksanakan, (4) dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya”.

Menurut Sutrisno Hadi (1996) tidak ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari suatu populasi. Ketidak tepatan yang mutlak tersebut tidak perlu menimbulkan keragu-raguan pada seorang penyidik. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penentuan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan tabel yang dibuat oleh Paguso, Garcia dan Guerreto yang dikutip oleh Sivilla sebagai mana tertera pada tabel di bawah ini :

**Tabel II.** Ukuran sampel Untuk Batas Kesalahan & Populasi Yang ditetapkan

POPULASI	BATAS-BATAS KESALAHAN					
	± 1 %	± 2 %	± 3 %	± 4 %	± 5%	± 10 %
500	*	*	*	*	222	83
1500	*	*	638	441	316	94
2500	*	1250	769	500	345	96
3000	*	1364	811	517	353	97
4000	*	1538	870	541	364	98
5000	*	1667	909	556	370	98
6000	*	1765	938	566	375	98
7000	*	1842	959	574	378	99
8000	*	1905	976	580	381	99
9000	*	1957	989	584	383	99
10000	5000	2000	1000	588	385	99
50000	8333	2381	1087	617	387	100

Sumber : Umar (2001)

Dari tabel di atas dan berdasarkan jumlah populasi yang ada, penulis menetapkan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 100 orang dengan mempertimbangkan efisien dan efektifitas penelitian. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Proportionate stratified random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2009).

Dari 100 personil yang ada kemudian dirumuskan dalam masing-masing strata dengan menggunakan rumus sampel kelompok :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan :

$n_i$  = Banyaknya Sampel pada Strata

$N_i$  = Banyaknya Populasi pada Strata

$N$  = Banyaknya Populasi Keseluruhan

$n$  = Banyaknya Sampel Keseluruhan

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dalam menentukan banyaknya sampel, peneliti mengambil taraf kesalahan 10%. Dengan demikian yang dijadikan sampel adalah 100 warga di lima Pedukuhan di Desa Bangunjiwo.. Apabila yang dijadikan populasi adalah 7.347 warga, maka jumlah sampelnya adalah 100 warga. Jumlah sampel untuk warga pedukuhan II Ngentak 30 warga, pedukuhan XI Sribitan: 18 warga, Pedukuhan XII Bibis: 15 warga, Pedukuhan XV Kalipucang : 18 warga dan Pedukuhan XIX Sembungan : 18 warga dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Ngentak  $= \frac{2236}{7.347} \times 100 = 30,4$  *dibulatkan menjadi 30*
- b. Sribitan  $= \frac{1.349}{7.347} \times 100 = 18,4$  *dibulatkan menjadi 18*
- c. Bibis  $= \frac{1107}{7.347} \times 100 = 15,1$  *dibulatkan menjadi 15*
- d. Kalipucang  $= \frac{1.356}{7.347} \times 100 = 18,5$  *dibulatkan menjadi 19*
- e. Sembungan  $= \frac{1299}{7.347} \times 100 = 17,7$  *dibulatkan menjadi 18*

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 30 + 18 + 15 + 19 + 18 = 100 responden.

#### 4. Jenis Data

Di dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer data sekunder.

##### a. Data Primer

Menurut Winarno Surachmad Data primer adalah data lengkap dan segera diperoleh dari sumber data penyelidik. Data primer adalah data lengkap dan segera diperoleh dari sumber data penyelidik.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dipilih dan dikumpulkan oleh orang luar dari penyelidikan atau bisa juga dari hasil dokumen studi pustaka seperti buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, undang-undang, Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban berbagai arsip maupun dokumen dari pihak terkait kinerja Pembangunan infrastruktur di Desa Bangunjiwo.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

a. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2013) Kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan maupun pertanyaan secara tertulis kepada responden. Dalam pelaksanaannya, terlu langsung kelapangan perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan karena melalui metode ini memerlukan kontak langsung antara responden dengan peneliti. Kuesioner yang disebarkan berfokus pada masyarakat di Desa Bangunjiwo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti Peraturan Desa, RPJMDes, Laporan Pertanggungjawaban Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, berbagai arsip maupun dokumen dari pihak terkait, buku-buku ilmiah, jurnal atau dokumen lain yang diperoleh yang berhubungan dengan yang akan diamati.

## 6. Teknik Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pengolahan data meliputi memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*), pemberian nilai (*scoring*) dan proses pembeberan (*tabulation*).

- 1) *Editing* yaitu memeriksa kembali data yang telah masuk ke responden mana yang relevan. Editing data merupakan proses pengoreksian dan pengecekan terhadap angket yang telah dijawab oleh responden apakah sudah dijawab secara lengkap atau belum. Seandainya sudah dijawab apakah sudah benar. Seandainya ada angket yang rusak, maka angket tersebut harus disortir dan tidak di proses lebih lanjut dalam tahap pengolahan data. Dari 100 angket yang disebar, dalam penelitian ini tidak ada angket yang rusak. Artinya 100 angket dapat diolah.
- 2) *Coding* yaitu pemberian data, simbol atau kode bagi tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Maksudnya adalah angket yang telah diedit diberi identitas sehingga memiliki arti dapat diproses pada tiap pengolahan data lebih lanjut. Dalam penelitian ini, untuk memudahkan dalam mengolah data, nama responden di imput berdasarkan nomor urut jumlah sampel yaitu nomor 1-100.
- 3) *Scoring* yaitu memberi angka pada lembar jawaban angket tiap subjek score dari tiap item atau pertanyaannya pada angket ditentukan sesuai dengan perangkat pilihan (*option*). Pada tahap ini, kuesioner yang telah diisi oleh responden dengan menggunakan tanda *checkil*, ketika diimput diubah

menjadi angka untuk kemudian dapat dihitung berapa persentase dan juga frekuensinya.

- 4) *Tabulasi* yaitu memasukan data pada table-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Pembuatan table dan memasukan data hasil angket kedalamnya sebagai persiapan analisis data melalui penerapan rumus statistic yang dipilih. Dalam penelitian ini table yang di gunakan yaitu frekuensi (F) dan juga persentase (%).

b. Analisis data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang bersifat kuantitatif, maka penulis menggunakan analisis statistic yaitu distribusi frekuensi dengan menggunakan aplikasi computer *SPSS 20 for windows* dan skala pengukuran Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial dalam penelitian, fenomena sosial ini, telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2015). Berikut ini merupakan tabel jawaban dari setiap item pertanyaan yang menggunakan skala likert :

<b>Skala jawaban</b>	<b>nilai</b>
Sanagat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Cara mengukur indeks dengan interval sebagai berikut :

1-1,80	tidak baik
1,81-2,60	kurang baik
2,61-3,40	cukup baik
3,41-4,20	Baik
4,21-5,0	Sangat baik

Selanjutnya menentukan hasil penelitian menggunakan indeks keseluruhan pada indikator Kinerja Kepala Desa dan Indikator Pembangunan Infrastruktur.

